

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun dari tingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh. Penyelenggaraan pemerintah desa memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahnya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman 1995;4) kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia.

Desa merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas, desa harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, desa mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif.

Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik.

Mengingat belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di desa-desa sebagian besar di Indonesia yang ditengarai sebagai akibat dari rendahnya kemampuan manajerial dan kualitas aparatur pemerintah desa. Pada tahun 2005 diketahui hasil penelitian dari Universitas Negeri Gorontalo di desa Tunas Harapan Kabupaten Pohuwato memberikan simpulan bahwa kemampuan manajerial serta kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pembangunan desa dalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan analisis kemampuan manajerial dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi pembangunan desa sebesar 45%, sedangkan sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh faktor lain (Arbain.2005). Selain itu pada tahun 2011 hasil penelitian dari Universitas Brawijaya yang dilakukan di desa Loceret Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pendidikan rata-rata aparatur desa Loceret masih sangat rendah, kedisiplinan aparatur desa, gaji/honor aparatur desa serta sarana dan prasarana penunjang sangat minim. Sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Disamping itu upaya dalam peningkatan kinerja aparatur desa dimana meningkatkan keterampilan aparatur desa, mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan aparatur, dan pengadaan fasilitas dan sarana penunjang kantor desa secara permanen (Sefty Yuli Purnamasari.2011).

Karena begitu kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendaknya dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelebagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembanguna secara menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa "Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara". Dengan demikian aparat desa dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan *Good Governance*, tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatnya pelayanan, seperti misalnya pelayanan prima dan standar pelayanan minimal. Akan tetapi perbaikan kualitas masih belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk mencapai kondisi tersebut di atas, antara lain bentuk desa, kondisi budaya dan sosial, aturan-aturan di dalamnya, serta keterbatasan SDM yang secara kualitas sangat beragam. Asal-usul desa merupakan roh yang akan membawa kemana arah penyelenggaraan pemerintahan Desa akan dilakukan. Dapat kita lihat dari penelitian di atas desa-desa di pulau Jawa dan Sulawesi belum sepenuhnya melaksanakan konsep otonomi daerah secara penuh, karena hal itu belum dilaksanakan oleh tiap-tiap perangkat secara maksimal dan optimal. Adapun pada tahun 2012 hasil penelitian dari Universitas Negeri Semarang di desa Karang Sambung Kabupaten Wonosobo terdapat 5 aspek yang menjadi indikator kesiapan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu aspek kewenangan yang wajib dilaksanakan, aspek desain organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme kerja, aspek daftar kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, aspek perencanaan biaya yang matang minimal dalam 1 tahun anggaran. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa aparaturnya belum siap terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi kelemahannya adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan dana yang ada. Oleh sebab itu disarankan agar setiap perangkat membuat dan melaksanakan rincian kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap perangkat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang berpedoman pada desain organisasi yang ada, setiap perangkat menyusun daftar kebutuhan dalam pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan proporsi dana yang tersedia dan setiap perangkat hendaknya menyusun perencanaan biaya atau estimasi dana secara matang sebelum membuat dan melaksanakan program (Heri Sutopo. 2012).

Selain itu berbagai asumsi dan hipotesa dijadikan alasan sebagai penyebab penyimpangan tersebut seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, disertai dengan kondisi kultur dan sosial masyarakat pedesaan Indonesia yang sangat beragam. Permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di seputar masyarakat Desa meskipun telah di atur sedemikian rupa melalui sebuah Undang-Undang yang baru nampaknya belum mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Walaupun dari sekian banyak penelitian yang ada di pulau Jawa dan Sulawesi jarang sekali menyinggung tentang kelembagaan dan hanya meneliti kinerja aparaturnya desa, maka penulis beranggapan bahwa kinerja aparaturnya desa di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki Desa/ Kelurahan sebanyak 389 Desa/ 14 Kelurahan sama seperti di pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: **”Kelembagaan Dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, supaya mudah dimengerti dan dipahami oleh kita semua yang mana diantara permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimanakah pengaruh kelembagaan dan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penyusun guna menjadikan permasalahan ini lebih jelas dan memiliki manfaat serta mudah dipahami masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya. Sesuai dengan judul skripsi ini ” KELEMBAGAAN DAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu)” maka dalam penyajian skripsi ini penyusun membatasi pada pengaruh dan kinerja kelembagaan dan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan teliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kelembagaan dan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah kelembagaan dan aparatur desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan usaha melihat kinerja kelembagaan dan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.